

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Kabupaten Buleleng

Dwiastuti, Ria. 2018. “*Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Efisiensi Ppj, Bphtb Dan Pbb P2 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Banyumas Periode 2013-2016*”. Skripsi thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Korengkeng, R. R., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).

Kumparan. 2018. PAD Buleleng Paling Tumbuh, Badung Tetap Paling Besar. <https://kumparan.com/kanalbali/pad-buleleng-paling-tumbuh-badung-tetap-paling-besar> (diakses pada 1 Juli 2021).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 Tentang Pemugutan Pajak Penerangan Jalan

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN

Meida Eka Rosella (2019). Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mojokerto (Studi Pada Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2017). (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Majapahit Mojokerto).

Ngantung, N. M. 2016. “Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).

Pratomo, Arif. 2018. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kebumen Tahun 2012 – 2016”. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen.

Permana, K. A. 2018. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016”. Skripsi. Univesitas Pendidikan Ganesha

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. (*Doctoral Dissertation*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
- Ramadhan, A. W. (2016). Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Sartika, D., Ramadhani, S., & Ilyas, A. 2020. “Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 22-31.
- Sinjal, A. C., Elim, I., & Pinatik, S. 2019. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Minahasa”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- SARI, M. P. 2019. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang”. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Syahelmi. 2008, Analisis Elastisitas, Efisiensi dan Efektifitas PAD Sumatra Utara dalam Era Otonomi Daerah. Tesis (tidak diterbitkan) Program Studi Ekonomi Pembangunan. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara Medan.
- Sudarsana, G. 2020. “Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018”. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- ULFAH, V. M. 2019. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2018)”. UNIVERSITAS PELITA BANGSA
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Pemeriksaan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.